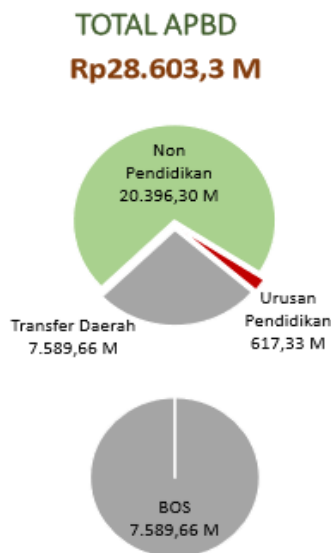


## Gores Pendidikan Jawa Barat, Luka yang Tak Kunjung Kering.

*Direktorat Kajian Strategis, Kementerian Luar Negeri BEM REMA UPI*

Menunaikan amanah alokasi anggaran sebanyak minimal 20% untuk dana pendidikan, Jawa Barat yang bahkan setiap tahunnya menganggarkan lebih dari 20% diluar dana alokasi khusus (DAK) masih harus menghadapi rentetan permasalahan seputar pendidikan. Dalam hal ini ada 3 permasalahan pokok yang cukup menarik perhatian yakni angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Jawa Barat, pembangunan infrastruktur pendidikan utamanya ruang kelas, dan kompleksitas polemik kualitas dan kesejahteraan guru.

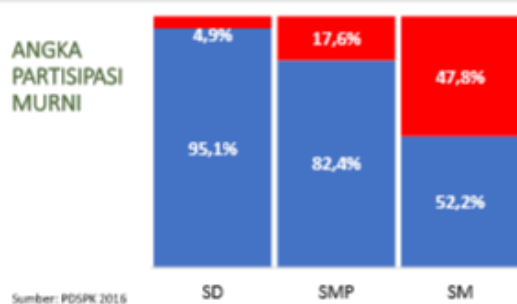


Sumber : Biro PKLN 2016

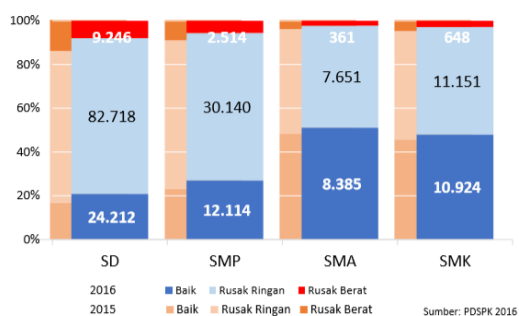
Provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 47 juta ini mencetak angka partisipasi kasar pendidikan pada kisaran 90% pada jenjang sekolah dasar dan jenjangsekolah menengah pertama namun masih pada kisaran angka lebih dari 60% pada jenjang menengah atas. Hal ini berdasarkan pada data neraca pendidikan Jawa Barat 2016 yang tentunya sudah menunjukkan kenaikan pada 2017 lalu.

Pada beberapa daerah, APK memang menunjukkan prestasi yang baik. Namun dapat dilihat melalui data APK pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI pada 2017 lalu, beberapa daerah di Jawa Barat masih menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Maka selanjutnya perlu menjadi fokus pemerintah untuk mengupayakan pemerataan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, APK yang masih rendah ini jika ditelusur juga tidak terlepas dari permasalahan infrastruktur yang belum mampu mengakomodir semua kebutuhan

pendidikan masyarakat Jawa Barat. Angka yang fantastis disebutkan pada September 2017 lalu sebanyak 170.000 siswa SMP tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMA di Jawa Barat karena kurangnya fasilitas ruang kelas guna menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Jawa Barat dituntut untuk kembali berpikir keras bagaimana alokasi anggaran dalam pembangunan infrastruktur pendidikan yang katakanlah besar namun harus mencukupi kebutuhan yang secara geografis sangatlah luas.



**KONDISI RUANG KELAS**

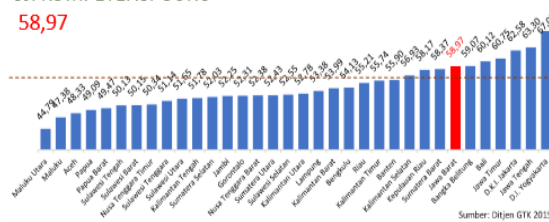


Tidak hanya sampai pada persoalan fasilitas, Uji Kompetensi Guru (UKG) di

Jawa Barat juga terbelang rendah yakni pada angka 58,97 dari skala 100. Meskipun dalam skala nasional, Jawa Barat menempati urutan ke-7 tertinggi. Dengan anggaran yang cukup besar, persoalan kualitas guru sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah Jawa Barat.

**UJI KOMPETENSI GURU**

**58,97**



Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144  
November 2016

Sejauh ini, memang upaya pemerintah Jawa Barat memperhatikan kesejahteraan guru dapat diapresiasi. Dilansir dari laman resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat dikatakan bahwa

*“Saat ini, setelah alih kelola SMAK/SMK oleh provinsi, tunjangan guru PNS mengalami kenaikan, dari awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 1,2 juta/orang. Begitu juga dengan tunjangan kepala sekolah dan tenaga pengawas, kepala sekolah Rp 4 juta dan tenaga pengawas Rp 4,5 juta/orang. Tidak hanya itu, guru non-PNS atau guru*



*honorer pun mendapatkan kenaikan honor. Kini, guru honorer mendapatkan honor sebesar Rp 85.000/jam mengajar tatap muka. Honor ini jauh lebih besar dibandingkan honor sebelumnya yang berkisar antara Rp 10.000/jam hingga Rp 35.000/jam”*

Selain itu, pada awal tahun 2018 pemerintah Jawa Barat memastikan gaji guru honorer sudah UMK sebagaimana yang tercantum dalam laman pelita karawang dikatakan :

*“Tambahan anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp1,9 trilion karena anggaran untuk gaji guru berasal dari pemerintah pusat yang besarnya hampir Rp1 triliun. Sedangkan untuk gaji guru dan tenaga kependidikan ditambah lagi dengan anggaran baru dari Pemprov Jawa Barat hampir Rp1,9 triliun. Adapun Sejumlah anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan operasional sekolah (BOS). Sementara dari pemerintah*

*pusat memberikan bantuan dana sekitar Rp8 triliun untuk SD, SMP dan SMA. Salain itu, anggaran tersebut digunakan untuk gaji tenaga kependidikan yang terdiri dari 28 ribu ASN ditambah 23 honorer termasuk perbaikan gedung pendidikan itu menghabiskan Rp1,9 triliun.”*

Namun, tak hanya persoalan kesejahteraannya saja. Pemerintah Jawa Barat juga perlu memperhatikan aspek perlindungan guru ditengah maraknya kasus kriminalitas antara tenaga dan peserta didik serta pemerataan sumber daya tenaga didik yang pada realita lapangan masih ditemukan kekurangan tenaga didik pada suatu daerah. Begitupula pokok problema tenaga didik yakni peningkatan kualitas dan kuantitasnya.

Lebih jauh dari tiga persoalan yang telah sejak awal disoroti, pemerintah hari ini juga diharapkan dapat bijak menyikapi persoalan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN BK) yang justru membuka luka polemik tidak meratanya fasilitas yang menunjang hal tersebut. Selain itu kebijakan full day school yang dipandang





masih belum tuntas pertimbangannya di pusat, harap dapat matang-matang dipertimbangkan oleh pemerintah Jawa Barat jika hendak diberlakukan atau ditiadakan. Selanjutnya, Jawa Barat yang sempat tersandung polemik Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) hingga tercatat sebagai provinsi yang paling banyak pengaduan masalah haruslah berbenah. Pengaturan sistem zonasi juga sepatutnya mempertimbangkan daerah-daerah yang masih kurang menjangkau fasilitas pendidikan, sempat terjadi *server down*, transparansi penerimaan dan deskriminasi peserta harus segera dituntaskan sebagai representasi semangat perbaikan pendidikan Jawa Barat.

Tentu pemerintah Jawa Barat hari ini bukan tanpa upaya. Telah tercatat goresan upaya pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan pendidikan. Tidak kunjung surutnya permasalahan pendidikan di Jawa Barat hari inilah yang patut kita evaluasi bersama. Apakah sistem yang berlaku selama ini tidak sesuai? Ataukah optimasi sistem yang tidak berjalan baik? Atau penyelewengan upaya

pembenahan pendidikan sehingga tidak menghasilkan angka yang memuaskan?

Pemerintahan Jawa Barat akan segera bergulir. Bagaimanakah konsepsi calon pemangku kebijakan selaku orang nomor satu di Jawa Barat selanjutnya dalam menanggapi *Pekerjaan Rumah (PR)* pendidikan Jawa Barat hari ini?